



DAMPAK KEBIJAKAN BEA KELUAR TERHADAP HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) DI TINGKAT PETANI

Muhammad Akmal Agustira dan Ratnawati Nurkhoiry

Abstrak Peluang usaha industri kelapa sawit di Indonesia diprediksikan masih akan terbuka lebar yang dipacu oleh meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit dunia. Naiknya permintaan minyak sawit menyebabkan harga minyak kelapa sawit cenderung meningkat, hal ini terlihat pada akhir 2010 dimana harga CPO telah menembus di atas US\$ 1.200/ton. Peningkatan harga minyak sawit dunia tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan petani kelapa sawit. Namun penerapan bea keluar yang tinggi dan bersifat progresif menyebabkan petani kelapa sawit kurang menikmati kenaikan margin yang seharusnya didapatkan dari tingginya harga minyak sawit di dunia yang berlaku saat ini. Penelitian bertujuan untuk melihat seberapa besar dampak penerapan bea keluar terhadap harga TBS di tingkat petani. Metode yang digunakan berdasarkan rumus ketetapan harga TBS dengan metode analisis data Regresi Linear Sederhana (RLS). Berdasarkan hasil penelitian, dampak penerapan Bea Keluar terhadap CPO menekan harga TBS di tingkat petani kelapa sawit sebesar 0,64 -0,66%, sehingga penerapan bea keluar CPO hingga 25% dapat menekan harga TBS ditingkat petani sebesar 20-21%. Besarnya dampak Bea Keluar terhadap pendapatan petani seharusnya dapat dikompensasi melalui perbaikan infrastruktur, mempermudah akses petani terhadap input produksi, pengembangan dan pemberdayaan petani, pembinaan kelembagaan petani, mempermudah akses kredit murah bagi investasi dan replanting, dan memperkuat lembaga penelitian dan pengembangan kelapa sawit.

Kata kunci : Bea keluar, kelapa sawit, harga, petani.

Penulis yang tidak disertai dengan catatan kaki instansi adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit

Muhammad Akmal Agustira (✉)
Pusat Penelitian Kelapa Sawit
Jl. Brigjen Katamso No. 51 Medan, Indonesia
Email: agustira_akmal@yahoo.com

Abstract Palm oil industry is predicted to still be prospective, driven by rising world demand for palm oil. The increasing demand for palm oil causes palm oil prices tend to rise, it is seen in last 2010 where the price of CPO has risen above U.S. \$ 1,200 / ton. Increasing palm oil prices will certainly affect the increased income of oil palm smallholders. Implementation progressive export tax causes less smallholders enjoy increased margins should be accepted, with the high prices of palm oil in the current world. The study aims to see how far the impact export tax for the TBS price at smallholder. The method used a model calculation based on the price determination formula TBS with methods of data analysis Simple linear regression. Based on this research, the impact of the implementation of the export tax push CPO prices at farm level TBS palm 0.64 -0.66%, so the application of tax on CPO prices down by up to 25% of farmers TBS level of 20-21%. The impact of export tax should be compensated for through infrastructure improvements, facilitate smallholder access to inputs production, empowering smallholder, farmer institutional development, access to cheap credit for investment and replanting, and strengthen oil palm research and development institutions.

Keywords: Export tax, oil palm, price, smallholder

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan komoditi strategis bagi pilar ekonomi Indonesia. Pertama, minyak sawit merupakan sumber devisa negara. Nilai ekspor minyak sawit Indonesia pada tahun 2010 tercatat mencapai 13,68 milyar USD (Ditjenbun, 2011). Kedua, kelapa sawit merupakan bahan utama minyak goreng yang dikonsumsi masyarakat. Minyak sawit memegang peranan penting dalam mempengaruhi inflasi. Ketiga, kelapa sawit sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi 3,5 juta orang kepala keluarga di Indonesia. Keempat, industri kelapa sawit

sebagai penggerak bagi pengembangan wilayah dengan membuka akses daerah terpencil dan sentra ekonomi bagi masyarakat, dan memberi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui dampak *multiplier effect* dari keberadaan industri kelapa sawit.

Perkembangan prospek Industri kelapa sawit di Indonesia sangat baik, dengan meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia. Kondisi tersebut menyebabkan harga minyak kelapa sawit cenderung meningkat, bahkan pada akhir 2010 harga CPO telah menembus diatas US\$ 1.200/ton.

Keberadaan kelapa sawit sebagai komoditas strategis dengan perkembangan harga yang terus meningkat, menyebabkan pemerintah membuat regulasi yang berkenaan dengan kelapa sawit untuk mengoptimalkan industrinya. Salah satunya adalah penerapan kebijakan Bea Keluar (BK) pada produk minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya secara progressif hingga mencapai 25%.

Peningkatan harga minyak sawit dunia tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan petani kelapa sawit. Namun penerapan bea keluar yang tinggi dan bersifat progresif menyebabkan petani sawit kurang menikmati kenaikan margin yang seharusnya didapatkan. Dengan demikian kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak pengaruh BK terhadap harga TBS diterima pada tingkat petani.

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam perekonomian suatu negara, kebijakan perdagangan internasional berperan sangat penting. Kebijakan perdagangan tersebut pada umumnya diutamakan untuk perluasan pasar internasional dan proteksi bagi pembeli domestik (Tambunan, 2006). Disamping itu, kebijakan perdagangan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah melalui pajak/pungutan dan terkait dengan kebijakan luar negeri suatu negara atau alasan-alasan politik tertentu (Reed, 2000).

Bea keluar (BK) adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan No. 17 Tahun 2006 yang dikenakan terhadap barang ekspor, dimana minyak sawit dan turunannya yang termasuk

dalam komoditi ekspor juga terkena kebijakan tersebut (Ditjen Bea Cukai, 2011). Menurut perkembangannya, pengenaan BK terhadap minyak sawit dan turunannya telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1980-an dengan mengimplementasi pajak ekspor. Kebijakan pajak ekspor yang pertama diimplementasikan pada bulan Agustus 1994 untuk menstabilkan dan mengamankan pasokan dan harga di dalam negeri. Pajak ekspor yang pada awalnya dikenakan pada CPO berkisar antara 40-60% yang dihitung secara berbeda berdasarkan harga CPO internasional dan harga patokan ekspor. Sejak 4 Juli 1987 sampai Februari 1998, pajak ekspor turun menjadi 5% dari harga CPO. Kemudian, selama masa krisis ekonomi yang menyebabkan harga CPO meningkat tajam dan depresiasi Rupiah, pemerintah melarang ekspor CPO diawal tahun 1998. Kondisi ini menyebabkan perubahan kebijakan pajak ekspor yang sangat drastis, yaitu peningkatan pajak ekspor dari 5% menjadi 60% yang kemudian turun lagi menjadi 30% pada Juli 1999 dan 4% pada tahun 2002 (Susila, 2004).

Seiring dengan perkembangan harga sawit yang fluktuatif dan cenderung meningkat menyebabkan pemerintah merubah penerapan BK secara progresif dengan kisaran 0-25% dengan pengenaan batas minimum pengenaan BK dengan harga referensi US\$ 700 per ton. Peraturan tersebut akhirnya disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.67/PMK/0.11/2010 yang berlaku hingga saat sekarang.

Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah tentang penerapan BK secara progressif untuk CPO dan produk turunannya ditujukan bagi produsen CPO, dan industri turunannya seperti minyak goreng dan oleokimia. Penerapan kebijakan tersebut diharapkan menjamin ketersediaan bahan baku bagi produsen minyak goreng di dalam negeri, sehingga pasokan komoditas tersebut terjamin dan harganya relatif stabil (Soeharto, 2005). Namun, dampak pengenaan BK dalam ekspor CPO terhadap pertumbuhan industri hilir sawit dan ekspor produk turunan minyak sawit belum terlihat bermakna. Investasi pada industri hilir sawit tidak hanya ditentukan oleh pengenaan BK, tetapi juga pemenuhan kondisi yang lain, seperti infrastruktur, konektivitas, dan iklim investasi kondusif sehingga pengenaan keluar belum efektif dalam memajukan industri hilir (Obado *et al.*, 2009).



Tabel 1. Perkembangan pungutan ekspor terhadap CPO.

Tahun	Besaran Pajak ekspor, Pungutan ekspor dan Bea keluar	Keterangan
1994 - Juli 1998	10 -40%	tergantung besarnya perbedaan harga dasar CPO yang ditetapkan yaitu US\$ 435/ton
7 Juli 1998	60%	Harga patokan ekspor mengikuti harga sawit dunia
1 Februari	40%	Harga patokan ekspor mengikuti harga sawit dunia
3 Juni 1999	30%	Harga patokan ekspor mengikuti harga sawit dunia
2 Juli 1999	10%	Harga patokan ekspor mengikuti harga sawit dunia
12 September 1999	5%	Harga patokan ekspor mengikuti harga sawit dunia
9 Februari 2001	3%	Harga patokan ekspor ditetapkan pemerintah tetap yaitu 160US\$
10 Oktober 2005	5%	Harga Patokan Ekspor ditetapkan berdasarkan harga minyak sawit dunia
15 Juni 2007	6,5%	Harga Patokan Ekspor ditetapkan berdasarkan harga minyak sawit dunia
1 September 2007	Pungutan ekspor Progressif 0% - 10%	Terkena PE jika harga mencapai ≥ 550 US\$/ton sampai dengan 10% (dengan harga >850 US\$/ton)
4 Februari 2008	Pungutan ekspor Progressif 0 - 25%	Terkena PE jika harga mencapai ≥ 550 US\$/ton sanpai dengan 25% (dengan harga >1300 US\$/ton)
30 Oktober 2008	Progressif 0% - 25%	Terkena PE jika harga mencapai > 700 US\$/ton sampai dengan 25% (dengan harga >1300 US\$/ton)
22 Maret 2010 s.d sekarang	Progressif 0% - 25%	Terkena Bea keluar jika harga mencapai ≥ 550 US\$/ton sampai dengan 25% (dengan harga >1250 US\$/ton)

Sumber : Observation and Research of Taxation (ORTAX), 2011 (diolah)

Penerapan BK pada CPO dan produk turunannya mengandung konsekuensi yang menguntungkan dan merugikan. Secara potensial, pihak yang diuntungkan dari penerapan BK adalah pembeli dalam negeri (industri hilir minyak sawit), pemerintah dan pesaing ekspor Indonesia untuk produk-produk tersebut. Industri hilir minyak sawit diuntungkan karena penerapan BK akan menekan harga CPO dan produk turunannya di pasar dalam negeri (Hasan *et al*, 2001). Penerimaan negara akan meningkat sesuai dengan besarnya tarif, harga dan volume ekspor. Penerapan BK cenderung menurunkan volume ekspor, sehingga pengeksportir luar negeri diuntungkan karena pengurangan ekspor. Hal ini tentunya menguntungkan bagi pesaing Indonesia seperti Malaysia yang tentunya akan mengambil pangsa pasar minyak sawit Indonesia (Munadi, 2007).

Sedangkan pihak yang dirugikan dari penerapan BK adalah produsen minyak sawit, dimana sisi pada struktur pasar yang kompetitif seperti minyak sawit

penerapan BK menyebabkan produsen minyak sawit akan menerima harga dibawah harga pasar dunia (Simeh, 2004). Para produsen Minyak sawit tentunya tidak mau menerima kerugian ini sehingga para produsen minyak sawit dalam hal ini CPO akan menekan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima pekebun rakyat, sehingga secara implisit, TBS di tingkat pekebun rakyat juga terkena BK, meskipun petani tidak mengekspor (Susila, 2004).

METODOLOGI

Dampak penerapan bea keluar akan mempengaruhi struktur harga yang diterima pekebun sawit rakyat. Untuk melihat seberapa besar pengaruh Bea Keluar terhadap pendapatan petani dibuat suatu metode dengan membuat suatu model perhitungan berdasarkan rumus ketetapan harga TBS dengan metode Regresi Linear Sederhana (RLS) dengan model sebagai berikut :

Tabel 2. Tarif bea keluar minyak sawit dan turunannya berdasarkan PMK N0.67/PMK/011/2010.

Harga Referensi (US\$/ton)	Tarif Bea keluar (%)					
	TBS dan Inti Sawit	Crude Palm Oil	Crude stearin	RBD Palm Stearin ³⁾	RBD palm olein dlm kemasan ≤ 25 kg	Biodiesel
≤ 700	40,0	-	-	-	-	-
≥ 700 – 750	40,0	1,5	-	-	-	-
> 750 – 800	40,0	3,0	1,5	-	-	-
> 800 – 850	40,0	4,5	3,0	1,5	-	-
> 850 – 900	40,0	6,0	4,5	3,0	-	-
> 900 – 950	40,0	7,5	6,0	4,5	2,5	2,0
> 950 – 1.000	40,0	10,0	8,5	6,0	5,0	2,0
> 1.000 – 1.050	40,0	12,5	11,0	8,5	7,5	2,0
> 1.050 – 1.100	40,0	15,0	13,5	11,0	10,0	2,0
> 1.100 – 1.150	40,0	17,5	16,0	13,5	12,5	5,0
> 1.150 – 1.200	40,0	20,0	18,5	16,0	15,0	5,0
> 1.200 – 1.250	40,0	22,5	21,0	18,5	17,5	7,5
> 1.250	40,0	25,0	23,0	21,0	20,0	10,0

Sumber PMK No.67/PMK/011/2010

$$\hat{Y} = a + bx \quad (1)$$

$\hat{Y}$ = bea keluar

x = Harga TBS diterima petani

a = intersep

b = koefisien regresi

perbandingan antara harga TBS yang dipengaruhi BK dengan harga TBS bila tidak dipengaruhi BK.

$$HTBS_p = HTBS_{nbk} - HTBS_{bk} \quad (2)$$

$HTBS_{nbk}$: Harga TBS yang tidak dipengaruhi BK

$HTBS_{bk}$: Harga TBS yang dipengaruhi BK

$HTBS_p$: Harga TBS diterima petani

dimana

$$HTBS_i = K_i ((HMS_i \times RMS_i) + (HIS_i \times RIS_i)) \quad (3)$$

dimana :

$HTBS_i$: Harga TBS yang diterima pekebun pada periode tertentu

HMS_i : Harga Minyak Sawit tertimbang realisasi penjualan ekspor (harga fob bersih) dan lokal dinyatakan dalam Rp/Kg

RMS_i : Tingkat Rendemen Minyak Sawit dinyatakan dalam persentase

HIS_i : Harga Inti Sawit periode tertimbang realisasi penjualan ekspor (harga fob bersih) dan lokal dinyatakan dalam Rp/Kg

RIS_i : Tingkat Rendemen Inti Sawit

K_i : Indeks proporsi yang diterima pekebun dinyatakan dalam persentase berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta biaya penyusutan.

$$HMS_i = ((H_{fob} - T) \times K_i) - MC \quad (4)$$

dimana

H_{fob} : Harga free (of cost till the goods come) On Board (of a ship) yaitu harga dimana

Seluruh biaya hingga naik ke kapal ditanggung penjual sedangkan biaya angkutan kapal selanjutnya hingga pelabuhan tujuan menjadi tanggung jawab pembeli, dinyatakan dalam US\$/ton.

Tax : Seluruh pajak yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan minyak

dan inti sawit dalam model ini yang diasumsikan adalah hanya bea keluar.

MC : Biaya pemasaran minyak sawit

Biaya pemasaran minyak sawit terdiri dari sewa tangki timbun instalasi pemompaan, asuransi barang, ongkos pemuatan ke pelabuhan, dan provisi bank sudah termasuk dalam faktor K (Permentan Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005), sehingga persamaan berubah menjadi

$$HMS_i = (H_{fob} - T) \times K_i \quad (5)$$

Dalam model perhitungan ini, harga inti sawit merupakan realisasi penjualan pasar lokal sehingga persamaan harga inti sawit adalah

$$HIS_i = HIS_i - MC \quad (6)$$

Dari persamaan tersebut akan diketahui proyeksi seberapa besar pengaruh bea keluar terhadap harga yang diterima pekebun rakyat berdasarkan berbagai asumsi tingkat rendemen yaitu 22%, 20% dan 22%

DATA

Kajian ini menggunakan data periode bulanan dari Januari 2009 hingga Maret 2011 dari berbagai sumber dan asumsi dalam beberapa variabel. Data harga referensi dan Harga Patokan Ekspor (HPE) diperoleh dari Peraturan Menteri Perdagangan mengenai harga patokan ekspor terhadap barang ekspor tertentu setiap bulannya. Besarnya BK berdasarkan PMK No.67/PMK.011/2011. Harga fob CPO diperoleh dari Oil World, dan Harga Inti diperoleh dari Dinas Perkebunan. Nilai tukar US\$ 1 diasumsikan dengan tingkat harga rata-rata Rp9.000,-. Data konstanta diasumsikan sebesar 85% dan 80% dengan tingkat rendemen inti sebesar 5,1% dan rendemen minyak sawit dibagi dalam tiga asumsi yaitu 22%, 20% dan 18%. Data penerapannya BK untuk mekanisme harga TBS terdapat pada Tabel 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data menunjukkan bahwa BK secara progressif berpengaruh terhadap harga TBS ditingkat petani. Hal ini ditunjukkan pada gambar grafik 1, 2 dan 3

dimana dari analisis dengan faktor K = 85 % dengan tingkat rendemen TBS 22% dan 20 % serta Faktor K = 80% dengan tingkat rendemen 20% penerapan bea keluar (BK) berpengaruh terhadap harga TBS di tingkat petani. Pada nilai K = 85 % dengan tingkat rendemen 22% dan 20% penerapan BK sebesar 25% berpengaruh sebesar Rp.564,16/kg dan Rp.467,42/kg di bawah harga TBS yang seharusnya diterima oleh pekebun rakyat, sedangkan dengan nilai K 80% dengan tingkat rendemen 20% penerapan BK sebesar 25% berpengaruh sebesar Rp 483,91 dibawah harga yang seharusnya diterima oleh petani.

Pengaruh BK terhadap harga TBS juga diperkuat berdasarkan analisis Regresi Linear Sederhana (RLS) terhadap harga TBS dengan nilai K 85% dan 80% dengan tiga tingkat rendemen yaitu 18%, 20%, dan 22% dimana koefisien determinasi yang dilakukan pada analisis data tersebut menunjukkan 0.986 atau 98,6% sehingga BK memiliki pengaruh nyata terhadap harga TBS ditingkat petani.

Pengaruh BK terhadap TBS disebabkan besarnya BK akan mengurangi harga CPO fob bersih yang terdapat di pelabuhan, dimana harga CPO fob bersih tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi harga TBS di tingkat petani selain faktor K, harga inti sawit dan tingkat rendemen yang terdapat didalam rumus harga TBS yaitu $K_i ((HMS_i \times RMS_i) + (HIS_i \times RIS_i))$.

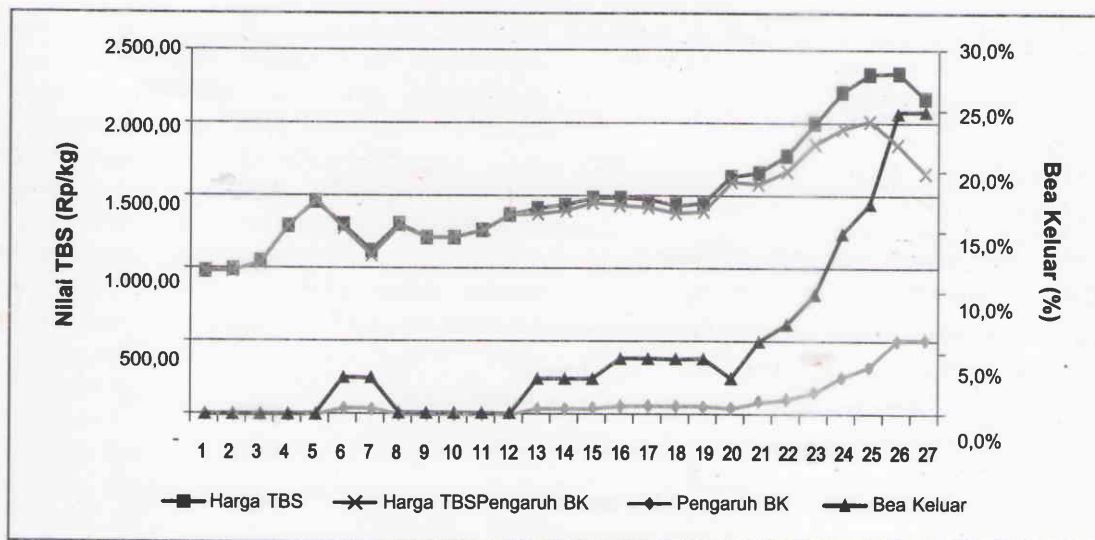
Untuk mengetahui seberapa besar BK terhadap harga TBS dihasilkan persamaan regresi masing-masing tingkatan harga untuk tingkatan nilai K dan rendemen dijelaskan pada Tabel 4.

Dari persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa setiap 1% dengan tingkat rendemen 22%, 20%, dan 18% masing-masing sebesar 0,66%, 065% dan 0,64% Rp/kg TBS. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh tingkat rendemen pada BK yang sama turut mempengaruhi harga ditingkat petani, sedangkan pengaruh K tidak mempengaruhi nilai BK terhadap harga TBS di tingkat petani. Sehingga dengan harga minyak sawit dunia pada bulan Maret 2011 harga fob sebesar US\$ 1.294,93/ton dengan harga referensi Cif bulan Maret, US \$ 1.294.53/ton dengan ketetapan BK 25%, maka tingkat harga TBS di tingkat pekebun dengan rendemen 20% seharusnya sebesar Rp.1.997,95, namun karena pengaruh BK sebesar 25%, maka harga di tingkat pekebun akan tergerus sebesar 21,05% atau Rp. 420,57/kg menjadi

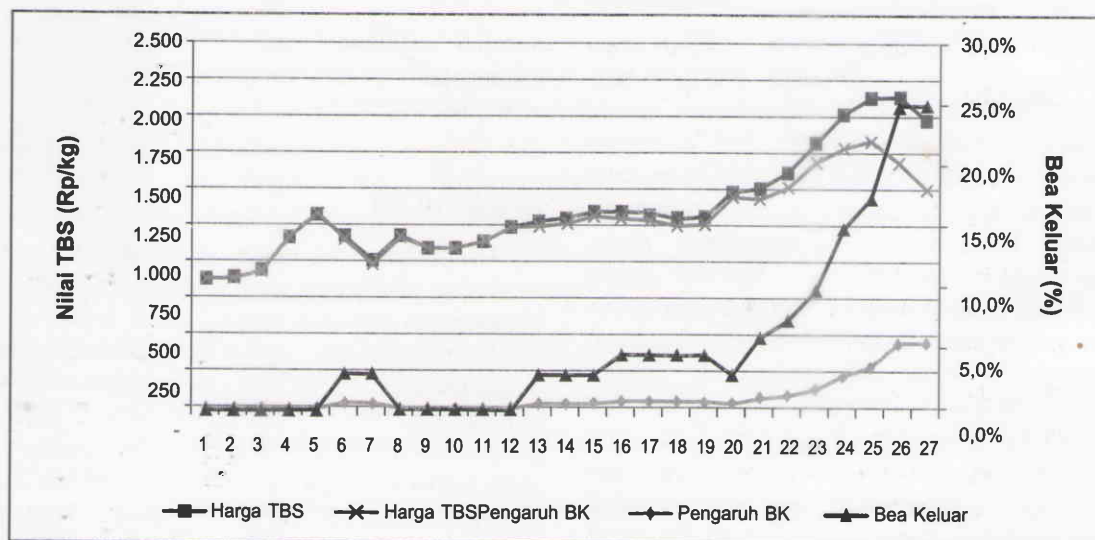
Tabel 3. Penerapan bea keluar untuk mekanisme pembentukan harga TBS.

Thn	Periode	Bulan	Harga Referensi (US\$/ton)*	HPE (US\$/ton)*	Bea Keluar (%)**	CPO, fob Ina (US\$/ton)***	Nilai bea keluar (US \$/ton)	Harga CPO fob setelah BK (US\$/ton)	Harga CPO fob non BK (Rp/kg)	Harga CPO fob setelah BK (Rp/kg)	Harga Inti (Rp/kg)
2009	1	Jan	490,73	418,00	0,0%	516,00	-	516,00	4.644,00	4.644,00	2.554,20
	2	Feb	555,98	482,00	0,0%	520,00	-	520,00	4.680,00	4.680,00	2.574,00
	3	Mar	553,30	480,00	0,0%	549,00	-	549,00	4.941,00	4.941,00	2.717,55
	4	Apr	588,38	515,00	0,0%	684,00	-	684,00	6.156,00	6.156,00	3.385,80
	5	Mei	634,01	560,00	0,0%	776,00	-	776,00	6.984,00	6.984,00	3.841,20
	6	Jun	774,93	700,00	3,0%	694,00	21,00	673,00	6.246,00	6.057,00	3.435,30
	7	Jul	757,43	683,00	3,0%	596,00	20,49	575,51	5.364,00	5.179,59	2.950,20
	8	Ags	647,84	574,00	0,0%	684,00	-	684,00	6.156,00	6.156,00	3.385,80
	9	Sep	689,42	615,00	0,0%	645,00	-	645,00	5.805,00	5.805,00	3.192,75
	10	Okt	691,22	617,00	0,0%	640,00	-	640,00	5.760,00	5.760,00	3.168,00
	11	Nov	669,69	595,00	0,0%	671,00	-	671,00	6.039,00	6.039,00	3.321,45
	12	Des	697,03	623,00	0,0%	723,00	-	723,00	6.507,00	6.507,00	3.578,85
2010	13	Jan	769,17	695,00	3,0%	742,00	20,85	721,15	6.678,00	6.490,35	3.672,90
	14	Feb	795,84	721,00	3,0%	756,00	21,63	734,37	6.804,00	6.609,33	3.742,20
	15	Mar	782,82	708,00	3,0%	785,00	21,24	763,76	7.065,00	6.873,84	3.885,75
	16	Apr	826,86	755,00	4,5%	790,00	33,98	756,03	7.110,00	6.804,23	3.910,50
	17	Mei	823,74	752,00	4,5%	781,00	33,84	747,16	7.029,00	6.724,44	3.865,95
	18	Jun	825,03	754,00	4,5%	760,00	33,93	726,07	6.840,00	6.534,63	3.762,00
	19	Jul	803,21	732,00	4,5%	766,00	32,94	733,06	6.894,00	6.597,54	3.791,70
	20	Ags	796,74	725,00	3,0%	866,00	21,75	844,25	7.794,00	7.598,25	4.286,70
	21	Sep	875,41	804,00	6,0%	881,00	48,24	832,76	7.929,00	7.494,84	4.360,95
	22	Okt	907,62	836,00	7,5%	939,00	62,70	876,30	8.451,00	7.886,70	4.648,05
	23	Nov	955,17	883,00	10,0%	1.057,00	88,30	968,70	9.513,00	8.718,30	5.232,15
	24	Des	1081,51	1.010,00	15,0%	1.172,00	151,50	1.020,50	10.548,00	9.184,50	5.801,40
2011	25	Jan	1184,37	1.112,00	17,5%	1.238,00	194,60	1.043,40	11.142,00	9.390,60	6.128,10
	26	Feb	1266,00	1.194,00	25,0%	1.243,00	298,50	944,50	11.187,00	8.500,50	6.152,85
	27	Mar	1294,53	1.222,00	25,0%	1.148,00	305,50	842,50	10.332,00	7.582,50	5.682,60

Sumber *) Departemen Perdagangan
 *) PMK No.67/PMK.011/2011
 ***) Oil World, 2011



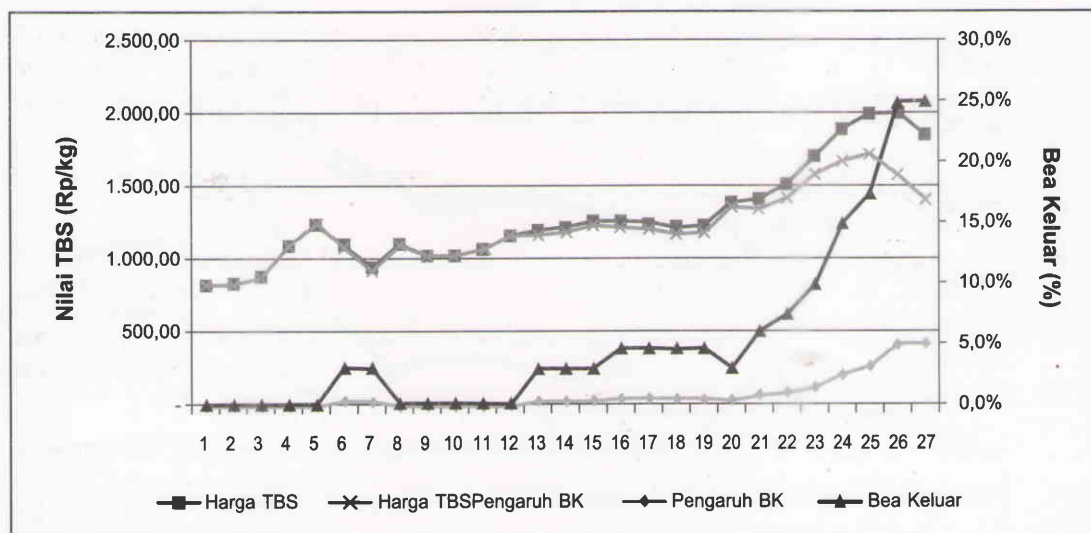
Gambar 1. Pengaruh bea keluar terhadap harga tbs petani dengan faktor k 85% dan rendemen 22%.



Gambar 2. Pengaruh bea keluar terhadap harga TBS petani dengan faktor K 85% dan rendemen 20%.

1.557,38/kg. Jika seorang petani pada bulan Maret menghasilkan 1,5 ton per bulan, maka potensi pendapatannya (*lost of revenue*) petani akan berkurang sebesar Rp 630.853,87 /ha pada bulan tersebut. Potensi kehilangan pendapatan tersebut sangat besar dimana harga minyak sawit dunia naik, petani kurang menikmati atas kenaikan harga tersebut.

Penerapan BK memang diperlukan untuk kebijakan mekanisme harga dan pasokan minyak goreng didalam negeri. Namun perlu dipertimbangkan, bagaimana mekanisme tersebut tepat sasaran dan bukan diinsentif bagi pengembangan kelapa sawit di Indonesia. BK seharusnya bukan ditujukan untuk menambah pendapatan pemerintah, tetapi bagaimana mengembalikan pendapatan dari BK bagi



Gambar 3. Pengaruh bea keluar terhadap harga TBS petani dengan faktor K 80% dan rendemen 20%.

pengembangan kelapa sawit rakyat dan pengembangan industri kelapa sawit yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun kelapa sawit rakyat. Tergerusnya harga TBS di tingkat pekebun rakyat akibat BK dapat dikompensasi melalui perbaikan infrastruktur jalan di sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit, mempermudah akses pekebun rakyat terhadap input produksi (bibit unggul dan pupuk), pengembangan dan pemberdayaan pekebun rakyat, mempekokoh kelembagaan pekebun rakyat seperti KUD dan Kelompok petani, mempermudah akses kredit murah bagi investasi dan replanting, mempermudah akses pasar pekebun rakyat, dan memperkuat lembaga penelitian dan pengembangan kelapa sawit. Hal yang menjadi perhatian adalah evaluasi apakah tujuan BK dapat

tercapai dan bagaimana BK dikembalikan untuk kepentingan industri sawit dan kesejahteraan pekebun sawit rakyat di Indonesia.

KESIMPULAN

Pengenaan Bea Keluar (BK) terhadap minyak sawit dan turunannya yang diekspor ke luar negeri berpengaruh terhadap harga TBS di tingkat petani. Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan bahwa setiap kenaikan 1% BK CPO mempengaruhi 0,64% - 0,66 % harga TBS di tingkat pekebun rakyat, sehingga pengenaan BK hingga pengenaan BK sebesar 25% akan menekan harga TBS ditingkat pekebun rakyat hingga sebesar 20 -21 %. Pengenaan BK dapat

Tabel 4. Persamaan regresi pengaruh bk terhadap harga TBS di tingkat petani.

No	Faktor K	Tingkat rendemen	Persamaan Regresi
1		22%	$Y = -0.002 + 0.864 X$
2	85%	20%	$Y = -0.002 + 0.850 X$
3		18%	$Y = -0.002 + 0.839 X$
4		22%	$Y = -0.002 + 0.839 X$
5	80%	20%	$Y = -0.002 + 0.850 X$
6		18%	$Y = -0.002 + 0.839 X$



digunakan sebagai kebijakan mekanisme harga dan pasokan minyak goreng di dalam negeri, namun dana yang peroleh dari BK seharusnya dikembalikan kepada pekebun sawit rakyat dalam bentuk berbagai program seperti perbaikan infrastruktur jalan, mempermudah akses pekebun rakyat terhadap input produksi (bibit unggul dan pupuk), pemberdayaan pekebun rakyat, mempekokoh kelembagaan pekebun rakyat seperti KUD dan Kelompok petani, mempermudah akses kredit murah bagi investasi dan replanting, mempermudah akses pasar, serta memperkuat lembaga penelitian dan pengembangan kelapa sawit. Hal ini penting dilakukan agar keberadaan Bea keluar tidak hanya bersifat regulatif saja tetapi dapat bersifat konstruktif bagi industri minyak sawit dan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifn, B. 2011. Menggugat manfaat bea keluar CPO. *Investor Daily*. Senin 10 Januari 2011
- Ditjen Bea Cukai, 2011. Kumpulan Informasi Bea Cukai. *Pustaka Bea Cukai*. www.beacukai.go.id. Diakses pada tanggal 23 Maret 2011.
- Ditjenbun. 2011. Statistik perkebunan. Jakarta
- Hasan, M., M. Reed, and M.A. Marchant. 2001. Effect of an export tax on competitiveness: the case of the Indonesia palm oil industry. *Journal of Economic Development* Volume 26 Number 2 December 2001.
- Munadi, E. 2007. Penurunan pajak ekspor dan pengaruhnya terhadap ekspor minyak sawit Indonesia di India. *Jurnal Informatika Pertanian* Volume 2 tahun 2007.
- Obado, J., S. Yusman, and H. Siregar. 2009. The impact of export tax policy on the Indonesian crude palm oil industry. *J. ISSAS* Vol.15. No.2: 1007-119 2009.
- Obervation and Research Taxation, 2011. www.Ortax.org
- Oil World. 2011. Oil world monthly Ista Mielke GmbH. Langenberg 25, 21007 Hamburg. Germany
- Reed, M.R. 2000. International trade in agricultural products. Upper Saddle. New Jersey: Prentice Hall.
- Simeh, A.M. 2004. Comparative advantage of the european rapeseed industry vis-avis other oils and fats producer. *Oil Palm Industry Economic Journal* Volume 4 No.27. lembaga Minyak Sawit Malaysia. Kuala Lumpur.
- Soeharto, R. 2005. Peranan industri minyak sawit dalam perekonomian Indonesia. Makalah disajikan pada Seminar nasional "Pengembangan Kelapa Sawit di Indonesia: Menuju Kesenambungan Sosial Ekonomi", Jakarta September 2005.
- Susila, W.R. 2004. Impacts of CPO export tax on several aspects of Indonesian CPO industry. *Oil Palm Industry Economic Journal* Volume 4 No. 27 Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Kuala Lumpur.
- Tambunan, T.H. 2006. Transformasi ekonomi di Indonesia teori dan penemuan empiris. Salemba Empat, Jakarta.